

Akulturasi..?

Oleh:

Dr. Samodra Wibawa, MSc.

Administrasi Negara, Fisipol UNTIDAR dan UGM

Em. samodra03@yahoo.com, hp. 081328001383

Tidak seorangpun manusia di dunia ini yang menyukai pertengkaran, percekocokan, konflik dan perang. Semuanya ingin damai, yang dengan itu kita dapat meraih atau mewujudkan cita-cita atau impian hidup kita.

Tapi kenyataannya kondisi yang tidak kita sukai itu seringkali terpaksa kita alami, kita lihat dan dengar. Konflik antar individu, kelompok dan masyarakat kadang-kadang atau malah sering kita saksikan, termasuk dalam hal ini terorisme, perang dan separatisme.

Mengapa konflik terjadi? Karena rebutan rejeki (ekonomi), rebutan kekuasaan (politik), gesekan budaya dan keyakinan atau semata-mata karena benci, gengsi, harga diri (psikologi).

Karena itu untuk mencegah terjadinya konflik, B dan C, misalnya, harus terpenuhi/dipenuhi kebutuhan ekonominya. Resep yang relatif paten untuk ini adalah: bebaskan A dan B untuk memenuhi (memuaskan) kebutuhan mereka, tapi mereka harus dicegah dari saling mengganggu di satu sisi dan pihak yang “menang” harus dipaksa untuk menyantuni yang “kalah” di sisi lain.

Siapa yang memaksa? *Ya* pemerintah. Tugas pemerintah (G, misalnya, yakni pihak yang dipilih oleh B dan C) adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi B dan C dan menjamin berlangsungnya kebebasan berusaha dan penyantunan terhadap yang lemah itu.

Persoalannya adalah seringkali G tidak memainkan fungsi/perannya sebagai pemerintah yang baik/ideal seperti itu. Misalnya: G lebih sayang kepada B. G lebih banyak melayani B daripada C. Jika begini, maka C akan protes, memberontak atau lari dari sistem pemerintahan ybs. Terjadi disintegrasi atau perpecahan –sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, meskipun seringkali menjadi pilihan yang dianggap baik atau terbaik oleh pihak yang tidak puas terhadap sistem.

Jadi, persoalannya adalah integrasi atau persatuan. Dan persatuan hanya terwujud, jika pemerintahnya adil.

Bisakah persatuan tetap terjaga, sekalipun G lebih mengasihi B daripada C? bisa saja, jika B dan C pun saling mengasihi. Sekalipun pemerintah tidak adil, rakyatnya tetap bersatu karena mereka saling mengasihi. Mungkin

inilah yang dimaksud dengan akulturasi: bercampurnya beberapa kebudayaan atau bahasa. Tapi sepertinya ini tidak realistis. B yang telah berakulturasi dengan C harusnya akan memprotes G, jika G menganakemaskannya seraya menganaktirikan C. Jika B tetap menikmati situasi tidak adil ini, maka rasa sayangnya kepada C patut diragukan.

Tampaknya kualitas G menjadi kunci penting dari persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sebagai bangsa kita telah punya lem perekat (Wirutomo):

- Nilai-nilai dasar yang sama (Pancasila)
- Norma dasar yang sama (Pancasila)
- Identitas yang sama (Indonesia, NKRI)
- Cita-cita yang sama (kesejahteraan bangsa, kejayaan negara)
- Toleransi dan solidaritas di antara sesama kita.

Dengan lem perekat semacam itu harusnya kita kuat, dan dengan kekuatan bersama itu kita harusnya dapat cepat menjadi negara yang maju. Persoalannya si G seringkali buruk kinerjanya (tidak adil, pilih kasih, mementingkan kebutuhannya sendiri dll.), sehingga merusak aspek terakhir di atas (toleransi dan solidaritas B dan C). B dan C akan terseret untuk hanya memburu kepentingannya saja tanpa memperhatikan kebutuhan pihak lain. Akibatnya akan terjadi konflik, dan ini merugikan semuanya.

Karena itu B dan C harus aktif mengkondisikan agar G selalu bersikap baik dan adil, transparan, responsif kepada semua pihak, bekerja dengan semangat tinggi melayani masyarakat.

Pustaka

KBBI, <http://kbbi.web.id/akulturasi>, dibuka 9.9.2016

Wirutomo, Paulus dkk., *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: UIP 2012

Tuguran, 9.9.2016

Biodata penulis

Lahir di Klaten tahun 1965. Tamat S1 AN 1989 (UGM), S2 kebijakan lingkungan 1994 (Bath, England), S3 AN 2003 (Speyer, Jerman). Menjadi dosen AN sejak 1990 di UGM dan sejak Pebruari 2016 ditugaskan sebagai dekan di Fisipol UNTIDAR, Magelang. Bukunya al. *Negara-negara di Nusantara* (Gamapress 2001), *Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer* (editor, Graha Ilmu 2009) dan *Politik Perumusan Kebijakan Publik* (Graha Ilmu 2011). Semester ini mengajar Ilmu Sosial Dasar, Sistem Sosial Indonesia dan Metode Penelitian Administrasi Negara.